

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Basri Baco Minta Gratiskan Sekolah negeri dan Swasta

Palmerah, Warta Kota

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta agar menerapkan pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta di Ibu Kota.

Harapannya, seluruh anak-anak berusia sekolah bisa tetap mengakses pendidikannya dengan baik.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pihaknya sudah membicarakan hal ini dengan Plt Kepala

Dinas Pendidikan

Purwosusilo

maupun

Sekda

Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Pada dasarnya, kata dia, efektif mendukung usulannya bahwa sekolah gratis tidak hanya di fasilitas negeri, tetapi di milik swasta.

"Sudah dikaji dan sudah dihitung uangnya, dan nambahnya itu tidak banyak. Saya diskusi dengan Pak Sekda terkait ini dan Pak Sekda setuju, bisa kita mulai untuk persiapan, daripada kisruh terus untuk urusan KJP," kata Baco pada Kamis (21/3/2024).

Baco mengatakan, setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan duit untuk program bantuan sosial (bansos) pendidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baco mencontohkan alokasi KJP setiap tahun menghabiskan duit Rp 4 triliun, pemerintah daerah dapat menambah duit Rp 800 juta atau Rp 1 triliun untuk merealisasikan program sekolah gratis tersebut.

Jika program ini dijalankan, Baco yakin persoalan yang selama ini menyandera masyarakat tidak mampu bisa segera selesai.

Diketahui, banyak warga yang tidak menyelesaikan sekolah di fasilitas swasta karena tidak mampu membayar iuran, hingga

ijazah miliknya ditahan sekolah akibat menunggak iuran.

"Hilang masalah pertama ijazah tertahan di sekolah swasta, kan itu masalahnya. Anak putus sekolah, anak enggak sekolah karena orang tua enggak bisa bayar, nah ini yang mesti kita lakukan untuk mencetak sejarah," ucap Baco.

"Cetak sejarah bahwa di Jakarta tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena dia tidak bisa bayar sekolah, kecuali dia enggak mau sekolah nah itu lain cerita," lanjut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Banyak Masalah

Selain itu Baco menilai, program bantuan sosial (bansos) pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah banyak menemui masalah. Karena itu pengawas pemerintah daerah tersebut mendorong program pendidikan gratis, namun tidak hanya di sekolah negeri tetapi di sekolah swasta.

Baco pun mengatakan, pemerintah daerah harus membuat perencanaan untuk melebur dana bansos pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Duit itu bisa digunakan untuk menggratiskan pendidikan anak-anak di seluruh sekolah negeri maupun swasta.

"KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) tetap ada, tapi KJP nya dilebur. Jadi dana KJP itu dijadikan sekolah gratis, karena apa? Faktanya itu banyak sekali masalah terkait KJP, mulai dari tidak tepat sasaran, tidak adil, dan tidak merata,"

kata Baco.

Daripada pencairan KJP kerap menimbulkan polemik, kata dia, sebaiknya dana tersebut dialihkan untuk menggratiskan pendidikan anak-anak. Apalagi banyak anak-anak dari ekonomi tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah swasta dan tidak mendapatkan KJP, sehingga mereka terpaksa putus di tengah jalan.

"Jadi sekolah negeri tetap pakai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) bagi yang rumahnya dekat dengan yang sekolah, bagi yang pintar, bagi yang

punya prestasi dan bagi yang miskin itu dengan kuota. Nah yang tidak di sekolah negeri, silakan cari sekolah swasta yang dekat rumah dan enggak perlu bayar," jelas Baco.

"Fakta hari ini, 50 persen di sekolah negeri itu orang mampu dan gratis. Sedangkan di swasta sekolah yang dengan grade (peringkat) C dan D, 100 persen orang yang tidak mampu bayar. Jadi sangat tidak adil, kira-kira begitu," lanjutnya.

Ia meyakini, koleganya dari berbagai fraksi akan mendukung langkah tersebut. Terlebih sekolah gratis di seluruh satuan pendidikan bisa merangsang orang tua untuk tetap mendorong anaknya agar tetap bersekolah dengan baik.

"Di fraksi saya dan semua fraksi pasti setuju. Kami tinggal coba mau wujudkan karena di beberapa daerah sudah ada, dan kajian menunjukkan bahwa pendidikan itu bisa dibidang kunci utama, pilar utama untuk meningkatkan kualitas masyarakat DKI Jakarta," ungkap Baco. (faf)